

Pengaruh Good Government Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Khanisa Luthfiyah Suwardi

Universitas Indonesia Membangun, Bandung, Indonesia

khanisasuwardi@student.inaba.ac.id

Kartika Berliani

Universitas Indonesia Membangun, Bandung, Indonesia

Kartika.berliani@inaba.ac.id

Article's History:

Received 23 June 2024; Received in revised form 17 July 2024; Accepted 28 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Suwardi, K. L., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Good Government Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2814-2827. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2970>

Abstract:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak dari Akuntansi Pertanggungjawaban, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggabungkan metodologi verifikasi dan deskriptif. Kuesioner didistribusikan kepada 30 personil SKPD untuk mengumpulkan data. Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk mengevaluasi validitas data, sementara koefisien Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan verifikasi, serta uji regresi linier berganda, untuk mengevaluasi dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntansi Pertanggungjawaban memiliki dampak positif yang substansial terhadap kinerja SKPD, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang memasukkan ketiga variabel independen secara statistik signifikan dalam kemampuannya menjelaskan variabilitas kinerja SKPD. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja SKPD secara substansial dipengaruhi oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntansi Pertanggungjawaban, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja SKPD dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif.

Keywords: Good Government Governance, Sistem Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, Kinerja SKPD, Kota Bandung

Introduction

Kinerja manajemen suatu organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilannya, karena organisasi berada dalam kondisi yang terus berkembang untuk mencapai tujuannya. Menurut Kholidah & Murtini (2014), Kinerja manajerial berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas manajerial oleh para manajer atau administrator. Pekerjaan yang tidak efisien, pemogokan, hasil kerja yang tidak optimal, dan pekerjaan yang lamban, semuanya dapat menjadi konsekuensi dari kinerja yang buruk. Meskipun hal ini merugikan organisasi, kinerja yang tinggi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi organisasi dan masyarakat, karena kinerja yang positif dan dinamis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Safitri, 2019).

Tingkat kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kegiatan, program, dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, membandingkan hasil kerja dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi kemajuan melalui informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil yang berkualitas. Selain itu juga menunjukkan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Perubahan signifikan telah terjadi di sektor publik sebagai akibat dari tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, transparansi, dan layanan publik yang berkualitas tinggi. Tujuan utama dari sektor publik adalah memberikan pelayanan publik, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Pemberlakuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejalan dengan tuntutan tersebut. Pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengaturan daerah kepada pemerintah daerah dan menggeser akuntabilitas dari vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada DPRD) dengan disahkannya kedua undang-undang tersebut. (Nengsy, 2019).

Hasil di beberapa bidang pelayanan pada semester kedua ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan semester pertama tahun 2022 pada masa kepemimpinan Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung, yang ditunjukkan oleh data survei kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi e-SKM di website skm.bandung.go.id. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) termasuk di antara delapan SKPD yang nilainya menurun. (Sutrisno, 2022). Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya yang ada di dalam yurisdiksinya secara efektif untuk mencapai kinerja yang optimal. Menurut Nurimansyah & Ariyani (2020), "Pemerintah memiliki kapasitas untuk membangun tata kelola yang baik, yang merupakan tanggung jawab bersama untuk pencapaian tujuan." Laporan Kinerja Instansi atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Laporan ini digunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban kinerja, misi, fungsi utama, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan dari setiap instansi yang ditetapkan melalui sistem akuntabilitas yang tepat" (Mayulida et al., 2023).

Menurut Wulandari & Septiani (2017), Sistem tata kelola yang baik bertanggung jawab atas pengelolaan hubungan antara anggota komite, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga dianggap sebagai proses yang transparan yang melibatkan penetapan tujuan, penilaian hasil, dan penilaian kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan tata kelola yang efektif. Hasil yang diperoleh melalui dedikasi yang tinggi merupakan indikasi dedikasi pemerintah untuk melayani masyarakat. Pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan konstituennya dan mengidentifikasi solusi untuk setiap masalah yang mungkin timbul sebagai hasil dari peningkatan kinerja.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada peraturan pengelolaan keuangan daerah (PP No.58 tahun 2005). Satuan kerja adalah entitas akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi di lingkungan satuan kerja dalam struktur pemerintahan kota. Perlakuan akuntansi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Dinas Pekerjaan Umum Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Lamitasari et al., 2022).

Menurut Erlina et al., (2013), Sistem akuntansi lembaga keuangan pemerintah daerah meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, pengikhtisaran, dan pelaporan atas kejadian, transaksi, dan peristiwa keuangan dalam rangka penyelenggaraan lembaga keuangan pemerintah daerah. Menurut Utari et al., (2016)), Akuntansi pertanggungjawaban adalah "sistem untuk pengembangan kebijakan strategis, rencana kerja, dan anggaran, serta evaluasi kinerja manajemen. Ini adalah sistem untuk alokasi tanggung jawab dan anggaran."

Literature Review

Akuntansi Pemerintah

Menurut Arif (2018:7) "Akuntansi pemerintahan adalah penyediaan jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah melalui pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penafsiran transaksi keuangan pemerintah."

Menurut Hasanah & Fauzi (2017) Akuntansi pemerintah adalah "Aktivitas pemberian jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penafsiran transaksi dan informasi keuangan untuk pemerintah..

Kinerja Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) No. 04 Tahun 2007, kinerja pemerintah didefinisikan sebagai “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan atau program kegiatan dalam mewujudkan sasaran, misi, dan strategi instansi pemerintah yang bersangkutan dalam mewujudkan sasaran, misi, dan strategi tersebut.”

Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.”

Good Government Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, adalah “pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara.” Terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Menurut Mardiasmo (2018:22) *Good Governance* adalah “Manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan kuat yang konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi politik dan administratif, penghindaran salah alokasi dana investasi, penerapan disiplin anggaran, dan pembentukan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan usaha.”

Menurut Mulyani et al., (2018:194) *good governance* merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Prosedur-prosedur tersebut dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 232, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Defitri (2018:64) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah “sistem yang mendokumentasikan dan memproses keuangan daerah dan data yang terkait, yang diawali dengan proses pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran, serta berujung pada pelaporan keuangan. Informasi ini disajikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban.”

Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Supriyono (2018:73) Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi dengan memeriksa wewenang dan tanggung jawab administrator. Pendapatan, biaya, laba, dan investasi dikumpulkan dan dilaporkan secara individual untuk setiap pusat pertanggungjawaban.

Menurut Sidabutar (2019:64-65) Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu disiplin ilmu akuntansi manajemen yang dikaitkan dengan wewenang masing-masing manajer. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban adalah metode untuk mengendalikan biaya atau pendapatan dengan mengaitkannya dengan lokasi di mana biaya atau pendapatan tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh individu yang bertanggung jawab atas lokasi tersebut.

Table 1. Previous Research

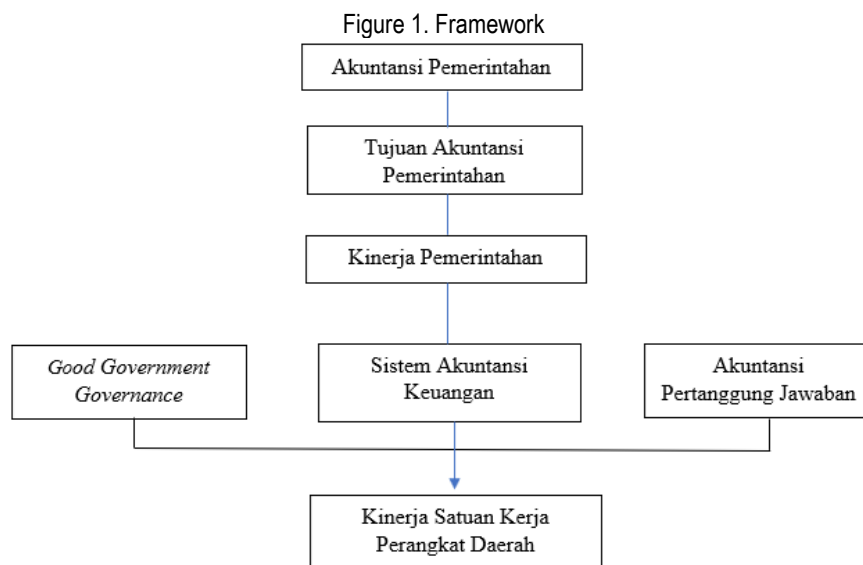
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fajar Meiyanti, Ichi dan Trisandi Eka Putri	Pengaruh Faktor Risiko Kecurangan, <i>Good Government Governance</i> Dan Organizational Citizenship Behavior	Penelitian ini menunjukkan bahwa value for money dipengaruhi secara signifikan oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, sedangkan risiko kecurangan di pemerintah daerah	Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian

	(ISSN : 2622-2191 Vol 1, No. 2, Januari 2019)	Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Pendekatan <i>Value For Money</i> (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Subang).	memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. Value for money ternyata tidak signifikan dipengaruhi oleh perilaku kewargaan organisasi di pemerintah daerah. Namun demikian, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh gabungan dari faktor risiko kecurangan, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan perilaku kewargaan organisasi terhadap value for money di pemerintah daerah adalah signifikan secara statistik.	
2.	Saverius Dhuri Mbipi, Prihat Assih, dan Maxion Sumtaky (ISSN : 2598-7763 Vol 3, No. 2, Januari 2020)	Pengelolaan Keuangan Daerah Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang dipengaruhi oleh Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai wujud good governance dan pemerintahan yang beretika. Penerapan SAP pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri berpengaruh positif terhadap Kapabilitas Dinamis. Integritas laporan keuangan SKPD dipengaruhi secara positif oleh penerapan SAP.	Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian
3.	Yohanes P. Bondan S, Ali Djamhuri dan Rosidi (ISSN : 1411-0288 Vol 19, No. 2, November 2017).	Kapabilitas Dinamis, Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kediri)	Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang, namun pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel tidak berdampak pada kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai wujud dari pemerintahan yang beretika dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kapabilitas Dinamis dipengaruhi secara positif oleh penerapan SAP pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri. Penerapan SAP memberikan dampak yang menguntungkan bagi integritas laporan keuangan SKPD.	Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian

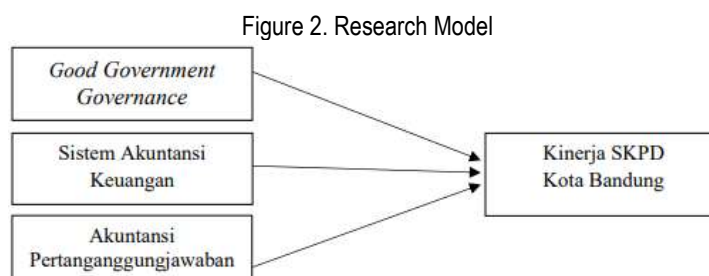
4.	Herda Nengsy (ISSN : 2089-6255 Vol 8, No. 1, Januari - Juni 2019)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban Dan <i>Job Relevant Information</i> Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hilir	Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir, kinerja manajerial dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan informasi yang relevan dengan pekerjaan.	Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian
5.	Salma Nur Azizah dan Sri Anik (ISSN : 2963-2730 Desember 2023)	Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Skpd Kota Semarang)	The performance of local government agencies (Y) in the Semarang City SKPD is not significantly and positively influenced by the regional financial accounting system (X1). The performance of local government agencies (Y) in the Semarang City SKPD is significantly positively impacted by the accountability of financial statements (X2).	Variabel Penelitian, Tempat Penelitian, Periode Penelitian

Source: summarized by the researcher (2024)

Framework of Thought



Research Model



Hypothesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2022:63) merupakan “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Menurut Djaali (2020:15) Hipotesis adalah “Suatu pernyataan tentang karakteristik populasi, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian.” Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Terdapat pengaruh Akuntansi Pertanggung Jawaban terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Terdapat pengaruh *Good Government Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Research Method

Penelitian ini menguji pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai SKPD. Rumus Pearson Correlation Product Moment digunakan untuk mengevaluasi validitas data, dengan kriteria koefisien korelasi $r > 0,30$ yang mengindikasikan validitas. Koefisien Cronbach's Alpha digunakan untuk menguji reliabilitas, dengan nilai batas bawah 0,6 yang mengindikasikan konsistensi dan keandalan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data yang terkumpul dan statistik verifikatif melalui uji regresi linier berganda untuk mengevaluasi dampak dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menjamin bahwa variabel-variabel independen tidak berkorelasi, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dengan analisis grafik dan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance, serta uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot untuk menjamin bahwa varians residual tetap. Pengaruh signifikan variabel independen (*Good Government Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi Pertanggungjawaban) terhadap variabel dependen (Kinerja SKPD) ditentukan melalui analisis regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3$. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen, sedangkan koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis melibatkan penggunaan uji parsial (t-test) untuk mengevaluasi dampak parsial dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan uji simultan (f-test) untuk mengevaluasi dampak gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, serta hubungan dan pengaruh variabel yang diteliti, digambarkan secara komprehensif dengan metode ini.

Results and Discussion

Validity Test

Tabel 4. Results Validity Test

Variables	Item No.	Pearson Correlation	Correlation Level	Conclusion
KINERJA (Y)	Y1	0.709	0.3610	Valid
	Y2	0.695	0.3610	Valid
	Y3	0.833	0.3610	Valid
	Y4	0.553	0.3610	Valid
	Y5	0.542	0.3610	Valid
	Y6	0.538	0.3610	Valid
	Y7	0.697	0.3610	Valid
	Y8	0.695	0.3610	Valid
	Y9	0.456	0.3610	Valid
GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)	X1.1	0.683	0.3610	Valid
	X1.2	0.544	0.3610	Valid
	X1.3	0.796	0.3610	Valid

	X1.4	0.548	0.3610	Valid
	X1.5	0.518	0.3610	Valid
	X1.6	0.517	0.3610	Valid
	X1.7	0.729	0.3610	Valid
	X1.8	0.440	0.3610	Valid
	X1.9	0.528	0.3610	Valid
	X1.10	0.616	0.3610	Valid
	X1.11	0.498	0.3610	Valid
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)	X2.1	0.612	0.3610	Valid
	X2.2	0.734	0.3610	Valid
	X2.3	0.812	0.3610	Valid
	X2.4	0.546	0.3610	Valid
	X2.5	0.650	0.3610	Valid
	X2.6	0.550	0.3610	Valid
	X2.7	0.709	0.3610	Valid
	X2.8	0.603	0.3610	Valid
AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)	X3.1	0.622	0.3610	Valid
	X3.2	0.499	0.3610	Valid
	X3.3	0.813	0.3610	Valid
	X3.4	0.539	0.3610	Valid
	X3.5	0.587	0.3610	Valid
	X3.6	0.550	0.3610	Valid
	X3.7	0.792	0.3610	Valid
	X3.8	0.389	0.3610	Valid
	X3.9	0.437	0.3610	Valid
	X3.10	0.622	0.3610	Valid
	X3.11	0.499	0.3610	Valid
	X3.12	0.813	0.3610	Valid
	X3.13	0.539	0.3610	Valid
	X3.14	0.587	0.3610	Valid
	X3.15	0.550	0.3610	Valid
	X3.16	0.792	0.3610	Valid
	X3.17	0.389	0.3610	Valid
	X3.18	0.437	0.3610	Valid
	X3.19	0.388	0.3610	Valid
	X3.20	0.460	0.3610	Valid
	X3.21	0.770	0.3610	Valid
	X3.22	0.375	0.3610	Valid
	X3.23	0.399	0.3610	Valid

Source: summarized by the researcher (2024)

Nilai Pearson Correlation semua item pada variabel Kinerja (Y), Tata Kelola Pemerintahan yang baik (X1), Sistem Akuntansi Keuangan (X2), dan Akuntansi Pertanggungjawaban (X3) lebih besar dari nilai kritis 0,3610, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji validitas. Oleh karena itu, semua item adalah valid. Hal ini menunjukkan keandalan item-item yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai setiap variabel.

Data dapat dianalisis lebih lanjut dengan jaminan bahwa instrumen pengukuran mampu menangkap konsep yang diukur secara akurat, karena semua item telah dinyatakan asli. Tingkat validitas yang tinggi ini sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keandalan temuan penelitian..

Reliability Test

Tabel 5. Research Reliability Test

Variables	Croanbach Alpha	Criteria	Researcher Results
KINERJA (Y)	0,832	0,6	Reliable

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)	0,796	0,6	Reliable
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)	0,811	0,6	Reliable
AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)	0,885	0,6	Reliable

Source: summarized by the researcher (2024)

Tabel 5 menampilkan hasil uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha untuk variabel Kinerja (Y), Good Government Governance (X1), GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) dan AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3). Berikut adalah nilai Cronbach Alpha yang diperoleh:

Interpretasi:

1. Kinerja (Y)

Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.832 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel Kinerja (Y) memiliki reliabilitas yang tinggi. Nilai ini jauh di atas batas minimum 0.6, sehingga dapat dikatakan bahwa item-item dalam variabel ini konsisten dalam mengukur konsep yang sama.

2. GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)

Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.796 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Nilai ini lebih tinggi dari batas minimum 0.6, menunjukkan bahwa item-item dalam variabel ini dapat diandalkan.

3. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)

Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.811 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) memiliki reliabilitas yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa item-item dalam variabel ini konsisten dan dapat diandalkan untuk mengukur konsep yang diinginkan.

4. AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)

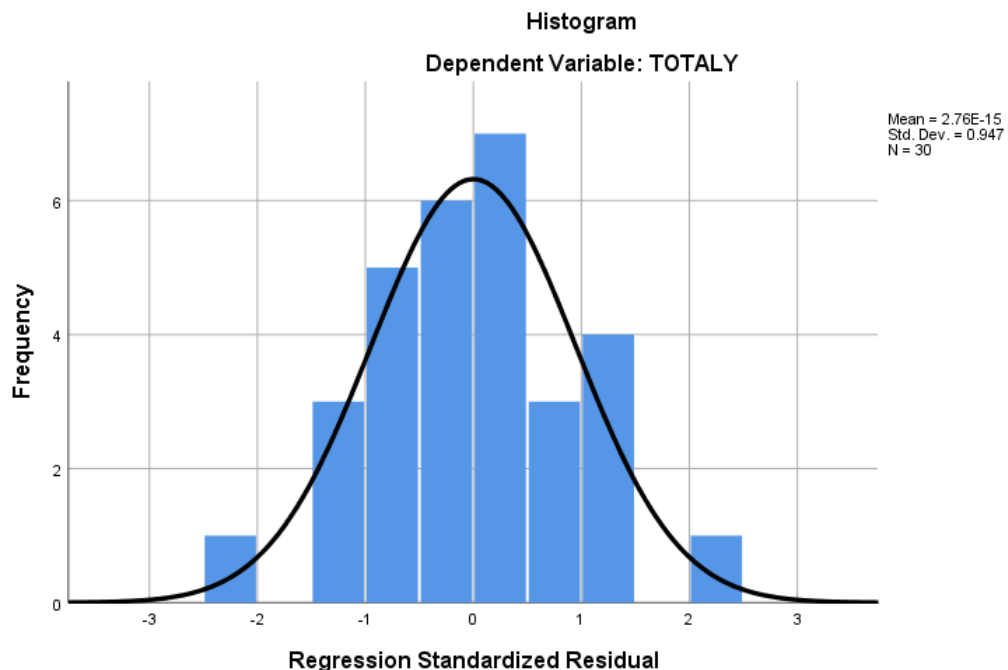
Nilai Cronbach Alpha sebesar 0.885 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Ini adalah nilai tertinggi di antara variabel-variabel lainnya, menunjukkan bahwa item-item dalam variabel ini sangat konsisten dalam mengukur konsep kinerja.

Kesimpulan:

Nilai Cronbach Alpha dari semua variabel yang diuji (Good Government Governance, Sistem Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pertanggungjawaban, dan Kinerja) melebihi kriteria minimum 0.6, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji reliabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat handal dan dapat dipercaya untuk mengukur setiap variabel secara konsisten. Oleh karena itu, temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan dengan instrumen-instrumen ini dapat dianggap valid dan dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
 a. Histogram

Figure 3. Results Histogram Test

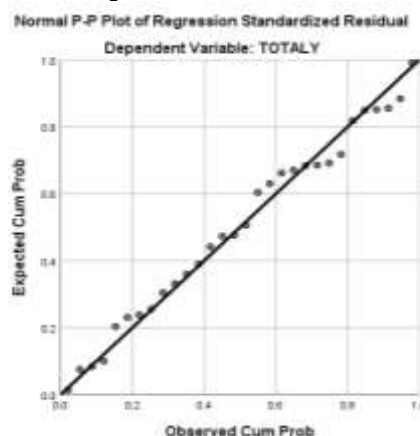


Source: summarized by the researcher (2024)

Histogram di atas menunjukkan distribusi dari residual yang distandardisasi dari model regresi dengan variabel dependen "KINERJA". Residual tersebar di sekitar nilai 0, dengan sebagian besar berada dalam rentang -2 hingga 2, membentuk histogram yang mendekati bentuk lonceng dan simetris. Nilai mean residual yang distandardisasi adalah 2.76E-15, sangat dekat dengan 0, menunjukkan bahwa rata-rata residual hampir nol, sesuai dengan asumsi regresi. Standar deviasi sebesar 0.947 menunjukkan sebaran residual di sekitar mean, dengan skala yang distandardisasi dengan baik. Berdasarkan 30 observasi (N = 30), histogram menunjukkan kesesuaian dengan distribusi normal, di mana residual mengikuti garis distribusi normal tanpa penyimpangan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual dalam regresi terpenuhi, memberikan validitas tambahan pada model regresi yang digunakan, dan menunjukkan bahwa hasil regresi dapat diandalkan serta analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan keyakinan bahwa asumsi-asumsi dasar regresi terpenuhi..

b. P-Plot

Figure 4. Results P-Plot



Source: summarized by the researcher (2024)

Grafik yang digambarkan pada gambar sebelumnya adalah P-P plot. Grafik P-P plot dapat dipahami dengan melihat penyebaran titik-titik pada garis diagonal grafik. Grafik P-P plot dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas jika titik-titik tersebar luas di atas garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal. (Ghozali, 2016:156). Grafik di atas mengilustrasikan kurva yang mewakili bentuk P-P plot dalam kaitannya dengan garis regresi. Data terdistribusi dan bergerak searah dengan garis diagonal, seperti yang diilustrasikan oleh grafik P-P plot di atas. Oleh karena itu, model regresi terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

c. One Sample Ks

Tabel 6. Results One Sample KS Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardised Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1,44062489514997
Most Extreme Differences	Absolute	0.076
	Positive	0.072
	Negative	-0.076
Test Statistic		0.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Source: summarized by the researcher (2024)

Nilai signifikansi (p-value) dan statistik uji disertakan dalam hasil uji Kolmogorov-Smirnov (KS) yang digambarkan di atas. Hasilnya diinterpretasikan sebagai berikut:

Interpretasi:

1. **Nilai N (30):** Jumlah sampel yang digunakan dalam uji ini adalah 30, yang merupakan ukuran sampel yang memadai untuk uji normalitas.
2. **Mean dan Std. Deviation:** Nilai mean dari residual adalah 0, yang menunjukkan bahwa rata-rata residual adalah nol. Standar deviasi yang sangat besar mungkin menunjukkan adanya masalah dengan skala data.
3. **Most Extreme Differences:** Nilai absolut terbesar dari perbedaan adalah 0.076, dengan perbedaan positif dan negatif yang hampir simetris.
4. **Test Statistic (0.076):** Nilai statistik uji KS sebesar 0.076 menunjukkan bahwa perbedaan antara distribusi kumulatif empiris dan distribusi kumulatif normal tidak terlalu besar.
5. **Asymp. Sig. (2-tailed) (0.200):** Nilai p-value sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05, yang berarti kita gagal menolak hipotesis nol bahwa residual berdistribusi normal. Dengan kata lain, data tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal.

Kesimpulan:

Residual yang tidak terstandarisasi terdistribusi secara normal, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Nilai p-value sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat diandalkan, dan memungkinkan untuk melakukan analisis tambahan dengan kepastian bahwa asumsi normalitas tidak dilanggar.

Multicollinearity Test

Tabel 7. Results Multicollinearity Test

Model		Tolerance	VIF
1	GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)	0.147	6.797
	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)	0.622	1.608

	AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)	0.121	8.242
--	------------------------------------	-------	-------

Source: summarized by the researcher (2024)

Tabel 7 menunjukkan hasil uji multikolinearitas untuk variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2), dan AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3). Hasil uji ini ditunjukkan melalui dua indikator utama: Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

1. **GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)**

- Tolerance (0.147): Nilai tolerance yang mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki multikolinearitas yang cukup tinggi. Nilai tolerance yang lebih besar dari 0.1 umumnya dianggap bebas dari masalah multikolinearitas yang serius, tetapi nilai yang sangat rendah seperti ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dengan variabel lain.
- VIF (6.797): Nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius. Namun, nilai VIF mendekati 10 mengindikasikan bahwa ada beberapa tingkat korelasi yang perlu diperhatikan.

2. **SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)**

- Tolerance (0.622): Nilai tolerance yang lebih besar dari 0.1 menunjukkan bahwa variabel ini bebas dari masalah multikolinearitas yang signifikan.
- VIF (1.608): Nilai VIF yang lebih kecil dari 10 mengindikasikan bahwa tidak ada multikolinearitas yang signifikan.

3. **AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)**

- Tolerance (0.121): Nilai tolerance yang sangat mendekati 0 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki multikolinearitas yang cukup tinggi. Ini berarti ada korelasi yang kuat dengan variabel lain dalam model.
- VIF (8.242): Nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa meskipun ada korelasi yang kuat, multikolinearitas masih berada dalam batas yang dapat diterima. Namun, nilai yang mendekati 10 ini perlu diperhatikan.

Kesimpulan:

Variabel SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) menunjukkan nilai tolerance dan VIF yang memuaskan, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang substansial, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji multikolinearitas. Namun demikian, variabel AKUNTANSI TANGGUNG JAWAB (X3) dan TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (X1) menunjukkan adanya multikolinieritas yang tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance yang rendah dan VIF yang mendekati angka 10. Hal ini mengindikasikan adanya masalah multikolinieritas yang substansial. Hal ini mengimplikasikan adanya korelasi yang kuat antara variabel-variabel tersebut dengan variabel lain dalam model. Meskipun nilai VIF tetap di bawah 10, sangat penting bagi para peneliti untuk memperhitungkan multikolinieritas ini dalam analisis selanjutnya.

Hypothesis Test
t Test

Tabel 8. Results t Test

	Model	T	Sig
1	(Constant)	-1,318	0,199
	GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)	3,632	0,001
	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)	-1,230	0,230
	AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)	3,168	0,004

Source: summarized by the researcher (2024)

Tabel 8 menampilkan hasil uji t untuk variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2), dan AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) dalam model regresi. Berikut adalah nilai t dan signifikansinya (Sig):

Interpretasi:

1. **Konstanta**

t = -1.318, Sig = 0.199: Nilai konstanta tidak signifikan ($p\text{-value} > 0.05$), menunjukkan bahwa nilai konstanta tidak berbeda secara signifikan dari nol. Ini berarti tidak ada pengaruh konstan yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model ini.

2. **GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1)**

t = 3.632, Sig = 0.001: Nilai t sebesar 3.632 dengan signifikansi 0.001 menunjukkan bahwa variabel GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat. Karena $p\text{-value} < 0.05$, kita dapat menyimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi.

3. **SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2)**

t = -1.230, Sig = 0.230: Nilai t sebesar -1.230 dengan signifikansi 0.230 menunjukkan bahwa variabel SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Karena $p\text{-value} > 0.05$, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi.

4. **AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3)**

t = 3.168, Sig = 0.004: Nilai t sebesar 3.168 dengan signifikansi 0.004 menunjukkan bahwa variabel AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (X3) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat. Karena $p\text{-value} < 0.05$, kita dapat menyimpulkan bahwa Kinerja secara signifikan mempengaruhi variabel terikat dalam model ini.

Kesimpulan:

Hasil uji-t menunjukkan bahwa variabel dependen secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh tata kelola pemerintahan yang baik (X1) dan akuntansi pertanggungjawaban (X3), sedangkan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2) tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam Sistem Akuntansi Keuangan dan Kinerja dapat memiliki dampak yang substansial terhadap kinerja organisasi, sedangkan Akuntansi Pertanggungjawaban tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks model ini.

f Test

Tabel 9. Results f Test

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	705.013	3	235.004	101.520	.000 ^b
	Residual	60.187	26	2.315		
	Total	765.200	29			
a. Dependent Variable: KINERJA						
b. Predictors: (Constant), KINERJA, AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN						

Source: summarized by the researcher (2024)

Hasil uji F (ANOVA) menunjukkan bahwa model regresi yang terdiri dari variabel GOOD GOVERNANCE GOVERNANCE (X1), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (X2), dan AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN (X3) secara statistik sangat signifikan dalam kemampuannya untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen "KINERJA". Nilai Sum of Squares regresi adalah 705.013, dengan 3 derajat kebebasan, yang diterjemahkan ke dalam Rerata Kuadrat sebesar 235.004. Kekuatan penjelas model regresi secara keseluruhan terhadap variabel dependen sangat signifikan, terbukti dari nilai F sebesar 101,520 dan tingkat signifikansi 0,000. Residual memiliki nilai Sum of Squares sebesar 60,187, dengan derajat kebebasan 26, menghasilkan Mean Square sebesar 2,315. Model regresi yang melibatkan X1, X2, dan X3 secara statistik sangat signifikan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen, yang dibuktikan dengan nilai $p\text{-value}$ yang sangat kecil ($p\text{-value} < 0,001$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel dependen "KINERJA" secara signifikan dipengaruhi oleh variabel independen secara bersama-sama."

Dicussion

Hubungan Pengaruh Good Government Governance dengan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Good Governance menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah : "Kepemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan

pemerintahan negara. Terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.”

Berdasarkan hasil penelitian Meiyanti & Mulyani (2020) Dari hasil pengujian secara simultan terbukti bahwa kombinasi tata kelola pemerintahan yang efektif, perilaku kewargaan organisasi, dan faktor risiko kecurangan memiliki dampak positif yang substansial terhadap nilai uang pemerintah daerah. Kesimpulan ini didukung oleh bukti statistik.

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil Tata Kelola Pemerintahan yang baik memiliki dampak yang cukup besar, yang mendukung pembahasan oleh Oktaviani, L. et al. mengenai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah. Namun, kualitas pegawai masih kurang karena hanya sebagian kecil pegawai yang memenuhi standar yang diharapkan karena berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah tidak adanya kompetensi peningkatan kapasitas pegawai dari leading sector, karena penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas merupakan tanggung jawab leading sector, bukan kecamatan/kelurahan..

Hubungan Sistem Akuntansi Pertanggung Jawaban dengan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Sidabutar (2019:64-65) Akuntansi pertanggungjawaban adalah “Salah satu bidang dari akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh setiap manajer atau dengan kata lain dengan akuntansi pertanggungjawaban merupakan media pengendalian biaya atau pendapatan dengan menghubungkan biaya atau pendapatan dengan tempat dimana biaya atau pendapatan tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh penanggungjawab dari tempat tersebut”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas terlihat bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban mempunyai pengaruh yang signifikan, hal tersebut dapat mendukung hasil penelitian oleh (Nengsy, 2019) akuntansi pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Hasil Penelitian Karsam & Manurung (2014) dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban tidak akan berjalan sebagaimana mestinya secara baik jika tidak diikuti adanya perubahan dalam proses organisasi

Conclusion

Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menyelidiki dampak dari Akuntansi Pertanggungjawaban, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Temuan menunjukkan bahwa kinerja SKPD secara signifikan ditingkatkan oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntansi Pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja suatu organisasi dapat ditingkatkan dengan penekanan yang lebih besar pada penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, Sistem Akuntansi Keuangan tidak menunjukkan dampak yang substansial terhadap kinerja SKPD, yang menunjukkan bahwa, meskipun penting, faktor ini mungkin memerlukan integrasi dengan komponen lain atau peningkatan dalam penerapannya untuk mendapatkan efek yang lebih substansial.

Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel, sehingga menjamin keandalan hasil penelitian. Model ini selanjutnya divalidasi dengan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang menjamin bahwa asumsi-asumsi regresi klasik terpenuhi.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja SKPD memerlukan penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Disarankan agar penelitian tambahan dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja SKPD. Selain itu, model harus diuji dalam berbagai konteks untuk memastikan bahwa hasilnya dapat digeneralisasi.

Reference

- Arif, P. (2018). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.

- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media.
- Karsam, & Manurung, R. L. R. (2014). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Memperkuat Hubungan Sistem Pengendalian Manajemen dengan Pencapaian Kinerja Perusahaan: Suatu Telaah Kepustakaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 486. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6599>
- Kholidah, L. A., & Murtini, H. (2014). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi dan Informasi Tugas Sebagai Pemediasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 239–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i2.4186>
- Lamitasari, E., Sudaryati, D., & Mahsuni, A. W. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Malang). *EJRA: E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(3), 1–8. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/17838/13502>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mayulida, S., Sudarma, A., & Suherman, A. (2023). Pengaruh Good Governance Dan Digital Leadership Terhadap Kinerja Organisasi Pada SKPD Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntoteknologi*, 15(2), 61–74. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto/article/view/2249>
- Meiyanti, T., & Mulyani. (2020). Faktor-Faktor yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (OJOL) di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i2.623>
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Nengsy, H. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. *JAK: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–18.
- Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik menuju Democracy Maturation. *JURNAL ECONOMIC RESOURCE*, 2(2), 114–127. <https://doi.org/10.33096/jer.v2i2.392>
- Safitri, D. E. (2019). Pengaruh Pelatihan Kinerja Terhadap Karyawan. *JURNAL DIMENSI*, 8(2). <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2154>
- Sidabutar, R. C. D. (2019). *Akuntansi Keperilakuan* (1st ed.). Universitas HKBP Nommensen.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Sutrisno, D. (2022). *Indeks Kepuasan Masyarakat di 8 SKPD Bandung Turun Jelang Akhir 2022*. IDN Times. <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/indeks-kepuasan-masyarakat-di-8-skpd-bandung-turun-jelang-akhir>
- Utari, D., Purwanti, A., & Prawironegoro, D. (2016). *Akuntansi Manajemen: Pendekatan Praktis* (4th ed.). Mitra Wacana Media.
- Nuridin, A., & Dayona, G. (2024). Pengaruh Self-efficacy, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Fastrata Buana Cabang Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10 (3). 2116-2127. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2540>
- Wulandari, N. A., & Septiani, A. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Sustainability Disclosure. *2Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 472–480. <https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19096>